

STRUKTUR DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN RUMAHTANGGA PETANI LAHAN SAWAH DI JAWA DAN LUAR JAWA

HANDEWI P.S. RACHMAN DAN SUPRIYATI

Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor

ABSTRACTS

This article following aim to study (1) structure earnings of farmer household of rice field farm in five kabupaten in Java and two kabupaten Off Java, (2) the earnings distribution and bearing of with ownership distribution of farm, and (3) formulating policy suggestion to improve earnings of household. Research use primary data result of survey of farmer household in MH 2000 / 01, MK I and of MK II 2001. Research result indicate that (1) agricultural sector still contribute more than 60% of earnings of household farmer of rice field farm in research area, and paddy farming system have compartment around 21 - 38% in Java and 23 - 41% Off Java to totalizing earnings of household, and there is tendency more and more wide of rice field farm of land holding high more and more level earnings of household, (2) distribution earnings of household in Java and Off Java have heavy Lameness level (Index of Gini >0,5) where mean Lameness level of household compared to heavier Java Off Java, and (3) entry of sector non-agriculture in structure earnings of household farmer of rice field farm have negative diffraction to earnings distribution which for example because of the lowering of accessing household to sector is non-agriculture. Implication of finding is important allocation priority of resource of development for relevant agricultural sector still placed forward. In agricultural sector strives the make-up of earnings related to scale efficiency domination of farm of land holding, usage of seed with quality and efficiency marketing and input output. Besides for the reduce of negative diffraction entry of farmer sector to distribution earnings of household in rice field farm area require to be considered to access household into the sector through extension of opportunity of job in sector non-agriculture.

Key Words: Income, Distribution, Farmer's Household, Rice Field, Jawa and off Jawa

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan lebih dari setengah abad di Indonesia telah memberi hasil cukup signifikan. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan nasional adalah meningkatnya tingkat pendapatan nasional (*gross domestic product*, GDP) ataupun GDP/kapita. Namun demikian, pertumbuhan pendapatan saja tidak cukup, penelaahan bagaimana besaran pendapatan nasional tersebut terdistribusikan di antara berbagai golongan penduduk merupakan salah satu ukuran untuk melihat pemerataan hasil-hasil pembangunan. Berkaitan dengan hal

tersebut, pemahaman struktur dan distribusi pendapatan merupakan salah satu topik bahasan yang relevan untuk dikaji.

Meningkatnya pendapatan penduduk sebagai salah satu indikator kesejahteraan seringkali dijadikan sebagai sasaran akhir pembangunan nasional suatu negara. Oleh karena itu pemahaman mengenai struktur, besaran dan distribusi pendapatan masyarakat merupakan kajian yang akan bermanfaat bagi pengambil kebijakan di semua sektor pembangunan. Dalam kajian struktur pendapatan, pemilahan sumber pendapatan rumahtangga menurut sektor dan sub-sektor bermanfaat untuk memahami potensi dan arah kebijakan pengembangan bagi sektor dan sub-sektor yang perlu prioritas penanganan kaitannya dengan peningkatan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja di suatu wilayah. Selain itu, analisis tentang distribusi pendapatan penduduk berguna untuk memahami tingkat ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan yang ada di antara berbagai golongan pendapatan.

Kecenderungan bahwa pendapatan rumahtangga di daerah-daerah *non-rice base farming* lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan rumahtangga pada daerah tradisional *rice base farming*, memberi petunjuk bahwa masyarakat petani sebenarnya responsif dan berusaha memanfaatkan bekerjanya mekanisme harga sebagai indikator ekonomi yang mengatur mereka dalam mengalokasikan sumberdaya mereka seoptimum mungkin (Rasahan, 1988). Fenomena tersebut mempunyai implikasi penting bagi pemerintah dalam rangka mengevaluasi konsekuensi ekonomis dari upaya-upaya mempertahankan swasembada beras dan penggalakan program diversifikasi pertanian guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Studi Rasahan (1988) menunjukkan bahwa terdapat dua pola utama yang mencirikan keadaan struktur dan distribusi pendapatan masyarakat pedesaan, **(1) Ada hubungan searah antara distribusi pendapatan dengan penguasaan lahan pertanian.** Pola ini umumnya dikenal pada masyarakat agraris di mana sumberdaya lahan (*land base agriculture*) memegang peranan sangat dominan dalam menciptakan arus masuk pendapatan masyarakat pedesaan, hal ini tampak di pedesaan Jawa maupun Luar-Jawa. Dengan kata lain, ketimpangan maupun pemerataan distribusi pendapatan dapat dijelaskan atau terefleksikan pada ketimpangan maupun pemerataan distribusi penguasaan lahan ataupun penggarapan lahan pertanian. **(2) Ada hubungan terbalik**

antara konsentrasi pendapatan dengan konsentrasi penguasaan atau penggarapan lahan pertanian. Kegiatan atau usaha-usaha non-pertanian atau usaha *non land base agriculture* dilihat sebagai alternatif sumber pendapatan rumahtangga pedesaan. Usaha tersebut dapat memberikan bias negatif maupun positif terhadap distribusi masyarakat pedesaan. Bias negatif apabila kehadiran usaha *non land base agriculture* sebagai sumber kegiatan menghasilkan arus pendapatan yang justru memperburuk distribusi pendapatan (kasus desa-desa Patanas Sulawesi Selatan), dan sebaliknya untuk bias positif (kasus desa-desa Patanas Jawa Barat).

Apakah fenomena di pedesaan yang terjadi 15 tahun yang lalu tersebut masih relevan dengan kondisi saat ini, kajian dengan menggunakan data dan informasi yang lebih aktual dapat menjawab pertanyaan tersebut. Berdasar hal tersebut tulisan berikut bertujuan untuk mengkaji (1) struktur pendapatan rumahtangga di pedesaan (khususnya petani lahan sawah di lima kabupaten di Jawa dan dua kabupaten di luar Jawa), (2) distribusi pendapatan dan kaitannya dengan distribusi pemilikan/penguasaan lahan, dan (3) merumuskan saran kebijakan untuk meningkatkan pendapatan rumahtangga.

METODOLOGI

Lokasi Penelitian, Data dan Informasi

Penelitian menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui metoda survei di lima kabupaten yang tersebar di tiga propinsi di Jawa dan dua kabupaten di Luar Jawa. Data bersumber dari penelitian kerjasama Puslitbang Sosek Pertanian dengan DAI/USAID. Lokasi penelitian yaitu Kabupaten Indramayu dan Majalengka (Jawa Barat), Klaten (Jawa Tengah), dan Ngawi dan Kediri (Jawa Timur) serta Kabupaten Agam (Sumatera Barat) dan Sidrap (Sulawesi Selatan). Di masing-masing kabupaten dipilih empat desa masing-masing merepresentasikan desa dengan luas lahan sawah dominan berdasar ketersediaan air irigasi yaitu desa lahan sawah irigasi teknis (ketersediaan air baik), setengah teknis (ketersediaan air sedang), sederhana (ketersediaan air kurang) dan lahan sawah tadah hujan. Di setiap desa diwawancara 20 petani lahan sawah yang dipilih secara acak dan mewakili buruh tani dan petani dengan penguasaan

lahan sempit, sedang dan luas relatif terhadap populasi petani lahan sawah di masing-masing desa.

Data primer yang dikumpulkan mencakup penggunaan input-output usahatani semua komoditas yang diusahakan petani di desa contoh, curahan kerja dan semua sumber pendapatan seluruh anggota rumahtangga contoh, pemasaran dan kelembagaan yang terkait dengan penggunaan input maupun pemasaran output. Data dikumpulkan untuk MH 2000/01, MK I dan MK II 2001.

Metoda Analisis

Untuk mengkaji struktur pendapatan rumahtangga, analisis dilakukan dengan metoda diskriptif melalui metoda akunting. Dalam hal ini pendapatan total rumahtangga merupakan penjumlahan pendapatan dari pertanian dan pendapatan non pertanian. Pendapatan dari pertanian dibedakan menurut sumbernya yaitu (a) usahatani padi, (b) usahatani palawija, (c) usahatani hortikultura, (d) usahatani tebu dan tembakau, (e) usahatani di lahan tegalan, (f) usahatani di lahan kebun, (g) hasil usaha kolam, (h) hasil usaha ternak, (i) berburuh di lahan sawah, dan (j) berburuh di lahan non sawah. Sementara itu pendapatan non pertanian dibedakan menurut sumber jenis usaha yaitu (a) industri, (b) perdagangan, (c) jasa, angkutan, (d) PNS/TNI-POLRI/pensiunan/karyawan, (e) berburuh non pertanian, (f) penyewaan aset, (g) transfer pendapatan, dan (h) sumber lain selain (a) sampai (g).

Analisis ragam sumber pendapatan dilakukan dengan menelaah sebaran rumahtangga menurut status rumahtangga dan jumlah sumber pendapatan. Dalam hal ini jumlah sumber pendapatan dibedakan menjadi 1; 2; 3; 4; dan ≥ 5 sumber pendapatan. Analisis dibedakan menurut status rumahtangga yaitu petani dan buruh tani. (Catatan : buruh tani adalah rumahtangga yang mata pencaharian utama kepala keluarga adalah buruh tani, batasan ini digunakan untuk analisis selanjutnya).

Analisis struktur dan distribusi pendapatan dilakukan untuk agregasi wilayah Jawa dan Luar Jawa. Namun demikian dalam analisis rumahtangga contoh dikelompokkan menurut status yaitu (a) rumahtangga petani, dan (b) rumahtangga buruh tani. Selain itu untuk menelaah hubungan antara penguasaan lahan dengan pendapatan rumahtangga, dilakukan pula analisis struktur pendapatan rumahtangga menurut luas

penguasaan lahan. Dalam hal ini rumahtangga contoh dikelompokkan menurut luas penguasaan lahan sawah pada MH 2000/01 yaitu: (a) 0. 00 Ha, (b) 0.001 – 0.10 Ha, (c) 0.101 – 0.50 Ha, (d) 0.501 – 0.75 Ha, (e) 0.7501 – 1.00 Ha, dan (f) > 1.00 Ha. Adapun sebaran rumahtangga contoh menurut status rumahtangga dan luas penguasaan lahan sawah disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Rumahtangga Contoh Menurut Kabupaten, Status Rumahtangga dan Kelompok Luas Sawah Garapan, Tahun 2001

Kabupaten	Total	Status Rumahtangga		Luas Sawah Garapan					
		Petani	Buruh-tani	0	0.01 - 0.10	>0.10 - 0.50	0.51 - 0.75	0.76-1	>1
I. Jawa	398	314	84	80	8	158	54	40	58
1. Indramayu	80	60	20	16	1	26	14	7	16
2. Majalengka	80	67	13	16	2	32	10	5	15
3. Klaten	80	67	13	11	2	46	12	6	3
4. Kediri	78	60	18	22	-	25	8	11	12
5. Ngawi	80	60	20	15	3	29	10	11	12
II. Luar Jawa	159	145	14	12	0	49	20	22	56
6. Agam	79	74	5	5	-	33	9	14	18
7. Sidrap	80	71	9	7	-	16	11	8	38

Sumber : Data Primer

Keterkaitan antara penguasaan/pemilikan lahan dan tingkat pendapatan ditelaah dengan melakukan analisis korelasi sederhana antara total pendapatan dengan pemilikan dan penguasaan lahan sawah. Selain itu untuk menelaah peran pendapatan dari sektor non pertanian dalam struktur pendapatan rumahtangga, dianalisis korelasi antara pendapatan non pertanian (Rp/kap/th) dengan pendapatan dari sektor pertanian (Rp/kap/th) dan pendapatan total rumahtangga (Rp/kap/th).

Untuk menganalisis distribusi pendapatan rumahtangga digunakan alat analisis penghitungan indeks Gini (*Gini Index Ratio*) yang dikembangkan oleh Szal dan Robinson (1977). Secara umum penghitungan indeks Gini dirumuskan sebagai berikut:

$$G = 1 + 1/n \cdot 2/n^2 Y (1y_1 + 2y_2 + \dots + ny_n)$$

atau

$$G = (1/n^2) \sum_i \sum_j (y_i - y_j) / Y$$

dimana:

n = total individu atau grup
 y = pendapatan individu
 Y = pendapatan rata-rata grup
 $i = 1, \dots, n$
 $j = 1, \dots, n$

Penghitungan indeks Gini dilakukan untuk (a) pendapatan total rumahtangga contoh selama tahun 2001, (b) pendapatan yang bersumber dari sektor pertanian selama tahun 2001, dan (c) pendapatan dari non pertanian selama tahun 2001. Besaran masing-masing pendapatan tersebut diukur dalam Rp/kapita/tahun dan dihitung untuk kelompok rumahtangga petani dan buruh tani di lokasi penelitian. Mengacu pada batasan yang dirumuskan oleh Oshima (1976) dalam Syukur *et al* (1988) maka besaran indeks Gini tergolong (a) ringan jika $G < 0.4$, (b) sedang jika $0.4 < G < 0.5$, dan (c) berat apabila nilai $G > 0.5$

RAGAM SUMBER PENDAPATAN RUMAHTANGGA

Sebaran rumahtangga contoh menurut status dan jumlah sumber pendapatan dapat disimak pada Tabel 2. Berdasar Tabel 2 terlihat bahwa terdapat variasi jumlah sumber pendapatan rumahtangga antar lokasi maupun antar status rumahtangga. Pada kelompok rumahtangga petani di Jawa, proporsi rumahtangga yang memiliki lebih dari ≥ 5 sumber pendapatan menempati pangsa tertinggi (sekitar 26 persen), diikuti oleh proporsi rumahtangga dengan 3 sumber pendapatan (25 persen), dan rumahtangga dengan 4 sumber pendapatan sebesar 23 persen. Sementara itu pada rumahtangga buruh tani porsi tertinggi (32 persen) pada rumahtangga dengan 2 sumber pendapatan, diikuti oleh rumah tangga dengan 3 dan 4 sumber pendapatan masing-masing dengan proporsi sebesar 27 persen dan 17 persen.

Di Luar Jawa proporsi petani paling tinggi yang memiliki 3 sumber pendapatan mencapai 28 persen. Kemudian diikuti petani dengan 2 sumber pendapatan sebesar 26 persen, dan petani dengan 4 dan ≥ 5 sumber pendapatan masing-masing sekitar 17 persen. Rumahtangga kelompok buruh tani di Luar Jawa relatif terkonsentrasi pada 2 sumber pendapatan yang mencapai lebih dari 57 persen. Sedangkan rumahtangga dengan satu sumber pendapatan sekitar 21 persen.

Tabel 2. Sebaran Rumahtangga Contoh Menurut Jumlah sumber pendapatan, status Rumahtangga dan lokasi contoh, tahun 2001

Jumlah Sumber Pendapatan	Jawa		Luar Jawa	
	Status Rumahtangga		Status Rumahtangga	
	Petani	Buruh tani	Petani	Buruh tani
1	17 (5,41)	13 (15,48)	18 (12,41)	3 (21,43)
2	65 (20,70)	27 (32,14)	37 (25,52)	8 (57,14)
3	79 (25,16)	23 (27,38)	41 (28,28)	2 (14,29)
4	71 (22,61)	14 (16,67)	24 (16,55)	0 -
>=5	82 (26,11)	7 (8,33)	25 (17,24)	1 (7,14)

Sumber: Data Primer (diolah)

Catatan: Angka (....) menunjukkan persentase

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa secara umum petani maupun buruh tani di Jawa dan Luar Jawa memiliki lebih dari satu sumber pendapatan. Hal ini ditunjukkan oleh relatif kecilnya proporsi petani dan buruh tani (di Jawa) yang memiliki satu sumber pendapatan rumahtangga. Studi Susilowati, *et al* (2002) di pedesaan Jawa Barat menunjukkan kecenderungan serupa yaitu bahwa tingkat diversifikasi pendapatan rumahtangga cukup tinggi. Dengan kata lain bahwa secara umum rata-rata rumahtangga di pedesaan tidak tergantung pada satu sumber pendapatan. Setidaknya terdapat dua alasan rumahtangga di pedesaan melakukan diversifikasi kegiatan untuk memperoleh pendapatan, yaitu (1) dengan satu sumber pendapatan rumahtangga tersebut tidak dapat memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan, dan (2) mengurangi resiko kegagalan, artinya apabila salah satu sumber pendapatan tidak berhasil masih ada sumber pendapatan lain yang dapat diharapkan.

Apabila jumlah sumber pendapatan petani dan buruh tani dibandingkan, terlihat bahwa secara umum diversifikasi pendapatan petani di Jawa maupun Luar Jawa lebih beragam dibanding buruh tani. Hal ini terkait dengan kesempatan kerja dan peluang berusaha yang dapat diakses oleh kelompok rumahtangga tersebut. Bagi rumahtangga buruh tani kesempatan kerja dan peluang berusaha relatif lebih terbatas dibanding

rumahtangga petani. Setidaknya kesempatan kerja di usahatani, bagi petani yang menguasai lahan diversifikasi sumber pendapatan dapat dilakukan melalui beragamnya komoditas atau pola tanam yang diusahakan. Selain itu dengan lahan yang dikuasai petani dapat melakukan akumulasi nilai tambah dari hasil usaha untuk kegiatan yang lebih beragam. Sementara itu pada rumahtangga buruh tani, dengan modal utama tenaga kerja yang dimiliki maka peluang seperti yang dimiliki rumahtangga petani kurang dapat diakses.

Dari uraian di atas dapat diungkapkan bahwa (1) tingkat diversifikasi sumber pendapatan rumahtangga bervariasi menurut lokasi (Jawa dan Luar Jawa) maupun status rumahtangga (petani vs buruh tani), (2) secara umum diversifikasi sumber pendapatan rata-rata rumahtangga petani relatif lebih beragam dibanding buruh tani, dan (3) ada kecenderungan diversifikasi sumber pendapatan rumahtangga terkait dengan akses rumahtangga terhadap kesempatan kerja dan peluang berusaha baik di sektor pertanian maupun non pertanian di masing-masing lokasi penelitian.

STRUKTUR PENDAPATAN RUMAHTANGGA

Analisis Menurut Status Rumahtangga

Keragaan struktur pendapatan rumahtangga contoh di daerah penelitian menurut lokasi dan status rumahtangga disajikan pada Tabel 3. (Catatan: Pendapatan usahatani padi, palawija, hortikultura, dan tebu & tembakau merupakan pendapatan *return to management, family labor and land*).

Secara umum data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa pendapatan yang berasal dari sektor pertanian masih mendominasi struktur pendapatan rumahtangga petani dan buruh tani baik Jawa maupun Luar Jawa dengan kontribusi lebih dari 60 persen. Bahkan bagi rumahtangga buruh tani di Luar Jawa pangsa pendapatan yang berasal dari pertanian mencapai lebih dari 96 persen terhadap total pendapatan rumahtangga. Hal ini menunjukkan bahwa di pedesaan yang dominan lahan sawah, sektor pertanian masih merupakan basis sumber pendapatan utama rumahtangga di Jawa maupun Luar Jawa. Implikasi dari temuan tersebut adalah bahwa kepedulian terhadap pentingnya sektor pertanian bagi pembangunan wilayah pedesaan tetap diperlukan. Kepedulian tersebut

dapat diimplementasikan dalam bentuk alokasi sumberdaya pembangunan yang proporsional bagi pengembangan pertanian di wilayah pedesaan.

Tabel 3. Struktur pendapatan rumahtangga menurut status dan lokasi penelitian, tahun 2001 (persen)

Sumber Pendapatan	Jawa		Luar Jawa	
	Petani	Buruhtani	Petani	Buruhtani
I. Pertanian	60,76	73,16	63,22	96,18
Usahatani Padi	27,09	5,13	31,28	20,26
Usahatani Palawija	6,46	1,22	2,17	0,00
Usahatani Hortikultura	16,36	1,31	12,82	0,00
Usahatani Tebu dan Tembakau	3,25	1,54	0,00	0,00
Usahatani di Lahan Tegalan	0,05	0,36	0,00	0,00
Usahatani di Lahan Kebun	1,43	0,06	6,21	0,08
Hasil Usaha Kolam	0,00	0,00	0,02	0,00
Hasil Usaha Ternak	3,04	10,14	7,19	13,01
Berburuh Tani di Sawah	2,94	45,93	3,44	60,46
Berburuh Tani di Non Sawah	0,14	7,47	0,09	2,37
II. Non Pertanian	39,24	26,84	36,78	3,82
Industri	3,36	1,20	5,02	0,00
Perdagangan	9,22	3,32	5,55	0,00
Jasa Angkutan	5,28	1,28	4,72	1,39
PNS dll	9,50	1,50	10,07	0,00
Buruh Non Pertanian	3,89	12,78	2,22	1,97
Penyewaan Aset	7,29	2,70	5,69	0,00
Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainnya	0,69	4,06	3,51	0,46
Total Pendapatan (Rp/kap/th)	3.433.131	1.106.572	2.845.815	892.860
Pdptan. Eq. Beras (Kg/kap/th)*	1.719,54	554,25	1.331,94	417,89

Sumber : Data Primer (diolah)

Keterangan: *) Rataan harga beras di pedesaan Jawa dan Luar Jawa Nov 2000-Okt 2001 masing-masing sebesar Rp 1.996,54/kg dan Rp 2.136,59/kg (BPS, 1995-2001).

Apabila struktur pendapatan rumahtangga petani dan buruh tani dibandingkan, terlihat bahwa pangsa pendapatan yang berasal dari sektor pertanian dari kelompok buruh tani lebih besar dari pada rumahtangga petani. Hal ini terlihat baik di Jawa maupun Luar Jawa. Sekali lagi fenomena tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dengan data yang terdapat pada Tabel 2 yaitu bahwa rumahtangga buruh tani relatif kurang akses terhadap kesempatan kerja dan peluang berusaha khususnya di sektor non pertanian. Secara tidak

langsung data pada Tabel 3 dapat diinterpretasikan bahwa tenaga kerja sebagai modal utama rumahtangga buruh tani sebagian besar sudah tercurah pada kegiatan pertanian sehingga kurang akses terhadap sektor non pertanian. Hasil kajian Supriyati, *et al* (2002) menunjukkan bahwa sekitar 68 – 96 persen curahan kerja rumahtangga buruh tani di ketujuh kabupaten penelitian tersebut untuk kegiatan di sektor pertanian. Sementara itu bagi rumahtangga petani di lokasi penelitian yang sama curahan kerja di sektor pertanian berkisar 52 – 70 persen dari total curahan kerja rumahtangga selama satu tahun.

Di sektor pertanian, pendapatan dari usahatani padi menempati porsi tertinggi yaitu sekitar 27 dan 31 persen masing-masing bagi rumahtangga petani di Jawa dan Luar Jawa. Sementara itu bagi rumahtangga buruh tani, pangsa pendapatan yang berasal dari berburuh tani (baik di lahan sawah maupun non sawah) di Jawa dan Luar Jawa menempati porsi tertinggi masing-masing sebesar 53 dan 63 persen.

Selain usahatani padi, pendapatan yang berasal dari usahatani hortikultura cukup dominan dalam menyumbang pendapatan rumahtangga petani lahan sawah di Jawa dan Luar Jawa masing-masing sebesar 16 dan 12 persen dari total pendapatan rumahtangga. Komoditas hortikultura yang umum diusahakan di desa-desa penelitian di Jawa adalah cabai hijau (dan merah) dan bawang merah di Indramayu dan Kediri, melon di Ngawi serta berbagai jenis sayuran dataran rendah lain seperti kacang panjang, paria, dan tomat. Untuk desa di Luar Jawa diusahakan komoditas cabai keriting dan tomat di desa-desa penelitian di Kabupaten Agam (Rachman, H.P.S *et al*, 2002). Sementara itu usahatani palawija menyumbang sekitar 6 dan 2 persen terhadap pendapatan petani di Jawa dan Luar Jawa. Komoditas palawija yang diusahakan petani adalah jagung, kedelai dan kacang tanah. Pemilihan jenis komoditas yang diusahakan petani di daerah penelitian secara umum dipengaruhi oleh kebiasaan dan ketrampilan petani dalam mengusahakan komoditas, kemudahan dalam memasarkan hasil, tingkat harga komoditas, dan kesesuaian lahan.

Di sektor non pertanian, secara umum pendapatan yang berasal dari sektor perdagangan, jasa dan angkutan, PNS dll serta berburuh non pertanian cukup berperan dalam menyumbang pendapatan rata-rata rumahtangga di lokasi penelitian di Jawa maupun Luar Jawa. Peranan pendapatan dari PNS dll terhadap total pendapatan rumahtangga cukup menonjol. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa penguasaan lahan

sawah sebagian besar dikuasai oleh para PNS (umumnya para guru) yang berdomisili di desa contoh penelitian. Usaha dagang juga merupakan sumber pendapatan yang cukup berperan di sektor non pertanian di daerah penelitian. Hal ini mudah di mengerti mengingat sektor ini merupakan salah satu sektor yang relatif mudah diakses oleh semua lapisan rumahtangga karena untuk masuk sektor ini tidak dibutuhkan syarat ketrampilan khusus, terutama bagi usaha dagang yang informal.

Tabel 3 menunjukkan bahwa secara nominal petani dan buruh tani di daerah lahan sawah di Jawa tingkat pendapatannya lebih tinggi dari pada di Luar Jawa. Apabila tingkat pendapatan rumahtangga di lokasi penelitian dideflasi dengan rata-rata harga beras pada tahun 2001 di daerah pedesaan Jawa dan Luar Jawa, maka secara riil perbedaan tingkat pendapatan petani dan buruh tani di Jawa dan Luar Jawa tidak terlihat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat pendapatan petani dan buruh tani di Jawa yang lebih tinggi tidak menjamin kesejahteraan yang lebih baik dibanding petani dan buruh tani di Luar Jawa. Pada kondisi dimana masyarakat sudah akses pada sistem pasar maka harga-harga komoditas yang dikonsumsi masyarakat cukup berperan dalam menentukan kesejahteraan rumahtangga.

Data pada Tabel 3 juga menunjukkan bahwa tingkat pendapatan petani secara nominal maupun riil lebih tinggi dari pada pendapatan buruh tani. Hal ini konsisten terlihat di lokasi penelitian di Jawa dan Luar Jawa. Secara teoritis hal tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan aset yang dikuasai (terutama aset lahan) maka petani dapat melakukan akumulasi modal yang berasal dari aset lahan yang diusahakan. Akumulasi modal dari usahatani akan menambah skala usaha petani dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan petani (asumsinya tidak terjadi kegagalan panen). Sementara itu bagi rumahtangga buruh tani, modal utama yang dikuasai hanya tenaga kerja, dengan demikian pendapatan yang diterima hanya tergantung dari curahan tenaga kerja saja (*return to labor*). Sedangkan rumahtangga petani menerima pendapatan dari *return to labor* dan *return to land*.

Analisis Menurut Luas Penguasaan Lahan

Apabila rumahtangga contoh di lokasi penelitian dikelompokkan menurut luas lahan sawah garapan, keragaan struktur pendapatan rumahtangga di Jawa dan Luar Jawa

dapat disimak pada Tabel 4 dan Tabel 5. Pada rumahtangga di Jawa terlihat pola konsisten pada skala luas garapan sawah 0; 0 – 0,1; 0,1 – 0,5 dan 0,5 – 0,75 makin tinggi luas garapan makin kecil sumbangan pendapatan yang berasal dari sektor pertanian dan ada kecenderungan makin rendah pula pangsa pendapatan yang berasal dari usahatani padi. Namun pada skala luas garapan sawah antara 0,75 – 1 ha dan > 1 ha pangsa pendapatan dari sektor pertanian dan dari usahatani padi meningkat lagi (Tabel 4). Fenomena tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, dengan luas garapan yang relatif kecil maka nilai produksi dari usahatani belum menyumbang secara signifikan pada pendapatan rumahtangga, dan untuk menambah pendapatannya petani berlahan sempit tersebut berupaya di kegiatan usahatani non padi dan atau kegiatan di luar usahatani bahkan di luar sektor pertanian.

Pada rumahtangga buruh tani (luas sawah garapan 0 ha) dan petani dengan sawah garapan antara 0 – 0,1 ha pendapatan dari sektor pertanian yang tinggi berasal dari berburuh tani baik di lahan sawah maupun non lahan sawah. Hal ini mengingat kelompok rumahtangga ini tidak menguasai aset lahan dan karenanya lebih mengandalkan modal tenaga yang dikuasai yang dicurahkan untuk berburuh tani. Sedangkan pada rumahtangga dengan luas garapan sawah antara 0,1 – 0,5 dan 0,5 – 0,75 menurunnya pangsa pendapatan dari pertanian diikuti dengan meningkatnya pangsa pendapatan dari non pertanian khususnya pada usaha dagang.

Secara umum data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa luas penguasaan lahan sawah garapan merupakan faktor penentu besarnya tingkat pendapatan rumahtangga di daerah lahan sawah di Jawa. Hal ini terlihat adanya kecenderungan bahwa makin luas sawah garapan makin tinggi pula besaran tingkat pendapatan rumahtangga. Dengan kata lain peranan pendapatan rumahtangga yang bersumber dari usaha non pertanian belum menyumbang secara signifikan pada struktur pendapatan rumahtangga petani di daerah lahan sawah.

Struktur pendapatan rata-rata rumahtangga contoh di dua kabupaten di Luar Jawa menurut luas sawah garapan dapat disimak pada Tabel 5. Pada rumahtangga di Luar Jawa terdapat pola makin luas sawah garapan makin kecil sumbangan pendapatan dari sektor pertanian (kecuali pada kelompok antara 0,1 – 0,5 ke 0,5 – 0,75 ha). Namun demikian untuk semua kategori luas sawah garapan terdapat kecenderungan makin tinggi

Tabel 4. Struktur pendapatan rumahtangga menurut luas sawah garapan di Jawa, tahun 2001 (%)

Sumber pendapatan	Luas sawah garapan (ha)					
	0	0 - 0,1	0,1 - 0,5	0,5 - 0,75	0,75 - 1	> 1
Total Pertanian	68,12	62,13	60,84	55,76	74,14	65,31
Usahatani Padi	1,02	23,37	20,75	21,38	33,28	37,55
Usahatani Palawija	1,24	7,77	5,63	6,42	6,26	8,04
Usahatani Hortikultura	1,25	0,00	16,40	17,23	26,10	13,28
Usahatani Tebu dan Tembakau	3,67	0,00	2,24	2,85	5,29	3,22
Usahatani di Lahan Tegalan	0,31	0,00	0,18	0,11	0,01	0,02
Usahatani di Lahan Kebun	0,08	0,00	2,53	1,31	0,92	0,65
Hasil Usaha Kolam	0,00	2,51	0,05	0,01	0,11	0,02
Hasil Usaha Ternak	9,05	2,56	4,65	3,13	1,21	2,01
Berburuh Tani di Sawah	46,38	34,88	7,72	3,27	0,95	0,52
Berburuh Tani di Non Sawah	5,13	0,64	0,68	0,03	0,00	0,00
Total Non Pertanian	32,22	37,87	39,16	44,24	25,92	34,69
Industri	1,37	0,00	1,50	0,00	1,24	4,80
Perdagangan	3,10	2,68	14,95	12,44	3,55	7,46
Jasa Angkutan	0,38	0,00	3,75	3,97	2,46	5,90
PNS dll	0,64	15,46	8,54	21,62	8,09	5,34
Buruh Non Pertanian	18,72	18,49	5,60	4,18	3,63	0,66
Penyewaan Aset	2,28	0,00	4,51	1,88	5,00	10,36
Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainnya	5,74	1,24	0,31	0,13	1,97	0,16
Total Pendapatan (Rp/kap/th)	907.093	755.537	2.427.853	3.018.709	3.574.796	5.552.198
Pdptan. Eq. Beras (kg/kap/th)	454,33	378,42	1.216,06	1.511,97	1.790,50	2.780,91

Sumber : Data Primer (diolah)

Jawa : Kab. Indramayu dan Majalengka (Jawa Barat), Klaten (Jawa Tengah), Kediri dan Ngawi (Jawa Timur).

Luar Jawa : Kab. Agam (Sumbar) dan Sidrap (Sulsel)

luas garapan makin besar sumbangan pendapatan dari usahatani padi. Kecuali pada kelompok rumahtangga dengan luas garapan > 1 ha diversifikasi pendapatan terlihat lebih dominan yang dicerminkan oleh menurunnya pangsa pendapatan dari usahatani padi diikuti oleh makin tinggi dan beragamnya sumbangan pendapatan dari non pertanian khususnya dari penyewaan aset (lahan, ternak dan alat-alat pertanian).

Secara umum terlihat pola yang konsisten (kecuali pada kelompok rumahtangga yang tidak menguasai sawah garapan di Jawa dan kelompok luas garapan > 1 ha di Luar Jawa) bahwa makin luas lahan sawah garapan makin tinggi tingkat pendapatan .

Tabel 5. Struktur pendapatan rumahtangga menurut luas sawah garapan di Luar Jawa, tahun 2001 (%)

Sumber pendapatan	Luas sawah garapan (ha)					
	0	0 - 0,1	0,1 - 0,5	0,5 - 0,75	0,75 - 1	> 1
Total Pertanian	93,22	0,00	64,90	68,25	67,04	64,94
Usahatani Padi	0,00	0,00	23,26	27,37	40,49	38,12
Usahatani Palawija	0,00	0,00	3,60	2,08	1,08	1,99
Usahatani Hortikultura	0,00	0,00	14,39	25,72	14,08	7,94
Usahatani Tebu dan Tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usahatani di Lahan Tegalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usahatani di Lahan Kebun	9,29	0,00	3,76	3,34	5,97	5,68
Hasil Usaha Kolam	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	-0,01
Hasil Usaha Ternak	10,59	0,00	5,93	4,13	2,85	9,76
Berburuh Tani di Sawah	70,77	0,00	13,64	5,55	2,45	1,46
Berburuh Tani di Non Sawah	2,57	0,00	0,22	0,07	0,11	0,00
Total Non Pertanian	6,78	0,00	35,10	31,75	32,96	35,06
Industri	0,00	0,00	0,00	0,58	12,11	1,09
Perdagangan	0,00	0,00	9,26	2,43	5,00	4,13
Jasa Angkutan	0,00	0,00	8,76	2,50	6,10	1,37
PNS dll	0,00	0,00	11,38	20,63	8,98	6,34
Buruh Non Pertanian	4,54	0,00	4,85	0,32	0,67	2,16
Penyewaan Aset	1,67	0,00	0,00	0,28	0,00	12,06
Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainnya	0,57	0,00	0,85	5,02	0,10	7,92
Total Pendapatan (Rp/kap/th)	934.674	0	1.570.936	1.803.138	3.928.802	3.854.193
Pdptan. Eq.Beras (Kg/kap/th)	437,46	-	735,25	843,93	1.838,82	1.803,90

Sumber : Data Primer (diolah)

Jawa : Kab. Indramayu dan Majalengka (Jawa Barat), Klaten (Jawa Tengah), Kediri dan Ngawi (Jawa Timur); Luar Jawa : Kab. Agam (Sumbar) dan Sidrap (Sulsel)

Apabila pendapatan kapita dengan luas pemilikan dan penguasaan lahan di lokasi penelitian dikorelasikan, terlihat bahwa di semua lokasi terdapat hubungan yang positif (Tabel 6). Hal ini mengandung arti bahwa secara nyata uji statistika menunjukkan adanya hubungan searah antara luas pemilikan dan penguasaan lahan dengan besarnya tingkat pendapatan rumahtangga. Artinya semakin luas pemilikan dan penguasaan lahan sawah garapan semakin tinggi tingkat pendapatan rumahtangga di daerah penelitian. Fakta tersebut menunjukkan bahwa penguasaan luas sawah garapan merupakan faktor

penentu besarnya pendapatan rumahtangga petani lahan sawah baik di Jawa maupun Luar Jawa.

Data pada Tabel 6 menunjukkan bahwa hubungan luas lahan sawah milik maupun garapan dengan pendapatan rumahtangga di Jawa lebih erat korelasinya dibanding di Luar Jawa yang ditunjukkan oleh lebih besarnya nilai koefisien korelasi. Hal ini dapat diartikan bahwa pada rumahtangga petani lahan sawah di Jawa luas sawah milik dan garapan sangat menentukan (secara uji statistika) besarnya pendapatan rumahtangga di banding di Luar Jawa. Selain itu untuk rumahtangga di Jawa, besarnya luas sawah garapan lebih menentukan besarnya tingkat pendapatan dibanding luas pemilikan sawah, hal sebaliknya terjadi pada rumahtangga di Luar Jawa. Fenomena tersebut terkait dengan pola penguasaan lahan yang ada di lokasi penelitian dimana pada desa-desa contoh di Jawa penguasaan lahan melalui sistem sewa maupun sakap cukup dominan sementara di Luar Jawa sesuai dengan adat dan budaya setempat sistem sewa maupun bagi hasil relatif jarang ditemui (Saptana, et al. 2002).

Tabel 6. Koefisien korelasi antara pendapatan rumahtangga dengan luas pemilikan dan garapan sawah di lokasi penelitian, tahun 2001

Lokasi penelitian	Luas pemilikan lahan sawah	Luas garapan lahan sawah
Jawa	0,44878 (0,0001)	0,48022 (0,0001)
Luar Jawa	0,35691 (0,0001)	0,21462 (0,0001)

Sumber: Data Primer (diolah)

Keterangan: nilai dalam () menunjukkan besarnya T rasio

Dari uraian di atas beberapa temuan pokok yang dapat diungkap adalah **(1)** Secara umum terdapat hubungan positif atau berbanding lurus antara luas penguasaan lahan sawah garapan dengan besaran tingkat pendapatan rumahtangga. Dalam hal ini semakin luas lahan garapan semakin tinggi tingkat pendapatan rumahtangga. Fenomena tersebut didukung oleh besaran absolut tingkat pendapatan maupun adanya hubungan korelasi yang positif antara luas penguasaan (dan pemilikan) lahan dengan pendapatan total rumahtangga; **(2)** Tidak terlihat pola hubungan yang konsisten antara luas penguasaan lahan dengan pangsa pendapatan yang berasal dari sektor pertanian, namun ada kecenderungan pangsa pendapatan yang berasal dari usahatani padi meningkat dengan

makin luasnya penguasaan lahan sawah garapan; (3) Di lokasi penelitian menunjukkan adanya pangsa pendapatan yang berasal dari penyewaan aset yang cukup menonjol dalam struktur pendapatan rumahtangga dengan luas penguasaan lahan garapan lebih dari satu hektar.

DISTRIBUSI PENDAPATAN RUMAHTANGGA

Gambaran tingkat ketimpangan pendapatan rumahtangga di daerah penelitian dapat disimak pada Tabel 7. Apabila distribusi pendapatan rumahtangga dipisahkan antara pendapatan dari sektor pertanian, pendapatan dari non pertanian, dan pendapatan total rumahtangga, dari Tabel 7 terlihat bahwa distribusi pendapatan dari non pertanian di semua lokasi penelitian lebih timpang dibanding distribusi pendapatan total maupun pendapatan dari pertanian. Tingginya tingkat ketimpangan pendapatan dari sektor non pertanian antara lain disebabkan oleh (a) partisipasi rumahtangga contoh yang terlibat dalam kegiatan non pertanian tidak setinggi di sektor pertanian, dengan kata lain tidak semua rumahtangga contoh terlibat dalam kegiatan non pertanian; dan (b) bagi rumahtangga yang terlibat di kegiatan non pertanian, pendapatan yang diperoleh dari kegiatan tersebut cukup signifikan dalam menyumbang pendapatan rumahtangga. Fakta tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kegiatan non pertanian mempunyai bias negatif terhadap pendapatan rumahtangga. Artinya masuknya aktifitas non pertanian sebagai sumber pendapatan rumahtangga justru memperburuk distribusi pendapatan di lokasi penelitian. Hasil penelitian Rasahan (1988) telah menemukan pula fenomena serupa untuk wilayah pedesaan Sulawesi Selatan.

Tabel 7. Indeks Gini Pendapatan per Kapita Rumahtangga Contoh di Daerah Penelitian, Tahun 2001

Lokasi	Pendapatan/kapita		
	Pertanian	Non Pertanian	Total pendapatan
Jawa	0,5046	0,9104	0,6805
Luar Jawa	0,4928	0,8828	0,5356

Sumber: Data Primer (diolah)

Apabila data pada Tabel 7 dicermati, dengan menggunakan batasan yang diajukan oleh Oshima (1976) terlihat bahwa tingkat ketimpangan pendapatan total rumahtangga di daerah penelitian tergolong berat. Dalam hal ini tingkat ketimpangan rata-rata rumahtangga di Jawa lebih berat dibanding di Luar Jawa. Hasil penelitian Adnyana et al (2000) menunjukkan kecenderungan yang sama yaitu ketimpangan pendapatan di Jawa yang lebih berat dibanding di Luar Jawa, dimana Indeks Gini pendapatan rumahtangga di Jawa sebesar 0.5214 pada tahun 1995 menjadi 0.5746 pada tahun 1999, di Luar-Jawa dari 0.4762 menjadi 0.4803.

Seperti diungkap pada awal tulisan apakah hadirnya sektor non pertanian sebagai penyumbang pendapatan rumahtangga berpengaruh positif atau negatif terhadap pendapatan rumahtangga dicoba dibuat korelasi sederhana antara pendapatan non pertanian (Rp/kapita/tahun) dengan pendapatan dari pertanian (Rp/kapita/tahun) dan dengan pendapatan total rumahtangga (Rp/kapita/tahun) hubungan tersebut dapat disimak pada Tabel 8. Secara umum terdapat hubungan positif antara pendapatan non pertanian dengan pendapatan total, artinya semakin tinggi pendapatan non pertanian semakin tinggi pula pendapatan total rumahtangga. Namun demikian seperti tersirat pada Tabel 7 masuknya sektor non pertanian dalam struktur pendapatan rumahtangga justru memperburuk distribusi pendapatan rumahtangga di daerah penelitian.

Tabel 8. Koefisien Korelasi antara Pendapatan non Pertanian dengan Pendapatan Pertanian dan Pendapatan Total Rumahtangga di Daerah Penelitian, tahun 2001

Lokasi	Pendapatan Pertanian	Pendapatan Total
Jawa	0,12387 (0,0001)	0,88427 (0,0001)
Luar Jawa	0,17782 (0,0001)	0,91273 (0,0001)

Sumber: data primer (diolah)

Keterangan: nilai dalam () menunjukkan besarnya T rasio

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Tingkat diversifikasi sumber pendapatan rumahtangga bervariasi menurut lokasi (Jawa dan Luar Jawa) maupun status rumahtangga (petani vs buruh tani). Selain itu ada kecenderungan diversifikasi sumber pendapatan rumahtangga terkait dengan tingkat diversifikasi usahatani di lahan sawah, aksesibilitas daerah terhadap pusat perekonomian,

dan ketersediaan serta kesempatan kerja di luar pertanian di masing-masing lokasi penelitian. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendukung diversifikasi usaha dan pendapatan rumahtangga yang diharapkan dapat memacu peningkatan pendapatan rumahtangga.

Di lokasi penelitian Jawa maupun Luar Jawa, pendapatan yang bersumber dari pertanian masih memiliki pangsa yang dominan dalam struktur pendapatan rumahtangga. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya keberpihakan dari pihak terkait untuk memperhatikan pengembangan sektor pertanian mengingat sektor tersebut masih menjadi tumpuan utama sumber pendapatan sebagian besar petani. Kebijakan harga input-output yang mendukung peningkatan pendapatan petani dalam berusahatani merupakan pilihan yang tetap diperlukan.

Peranan pendapatan yang berasal dari usahatani padi pada berbagai srtata penguasaan lahan rumahtangga contoh di Jawa antara 21 - 38 persen dan di Luar Jawa antara 23 – 41 persen terhadap total pendapatan rumahtangga. Implikasi dari temuan ini adalah walaupun usahatani padi tidak sepenuhnya dilandasi oleh motif ekonomi namun juga oleh kondisi fisik sumberdaya lahan, padi sebagai bahan pangan utama penduduk dan juga merupakan komoditas strategis di tingkat nasional maka upaya peningkatan pendapatan petani padi melalui penemuan varietas unggul baru, efisiensi penggunaan input dan keterjaminan harga dan pemasaran input-output merupakan strategi kebijakan yang patut dikedepankan.

Peranan usahatani hortikultura yang diusahakan di lahan sawah di daerah penelitian yang potensial memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pendapatan rumahtangga. Pada kondisi demikian hasil kajian terhadap komoditas hortikultura yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif di lokasi contoh penelitian patut dipertimbangkan pengembangannya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tujuan akhir pembangunan pertanian secara umum adalah peningkatan kesejahteraan dan pendapatan petani.

Distribusi pendapatan dari pertanian di daerah penelitian secara umum lebih merata dibanding distribusi pendapatan total rumahtangga. Ketimpangan pendapatan total rumahtangga memiliki hubungan searah dengan ketimpangan pendapatan dari non

pertanian. Artinya, masuknya aktifitas non pertanian sebagai sumber pendapatan mempunyai bias negatif atau memperburuk distribusi pendapatan total rumahtangga. Hal ini antara lain karena akses rumahtangga pada sektor non pertanian relatif terbatas. Implikasi dari temuan ini adalah pengembangan kegiatan dan kesempatan kerja sektor non pertanian di pedesaan perlu diperluas sehingga akses rumahtangga pedesaan terhadap sektor tersebut meningkat dan pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan rumahtangga.

Implikasi Kebijakan

Terdapat hubungan searah antara tingkat pendapatan total rumahtangga dengan luas pemilikan dan penguasaan lahan sawah garapan. Implikasi dari fenomena tersebut adalah pentingnya pelaksanaan *land reform* yang merupakan salah satu instrumen terwujudnya pemerataan pemilikan dan penguasaan lahan garapan menjadi prasyarat tercapainya pemerataan pendapatan di rumahtangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, M.O. 2001. Struktur Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Pada Berbagai Agroekosistem di Wilayah Sumatera, Jawa-Bali dan Kalimantan. Makalah disampaikan pada Seminar Rutin P/SE Nopember 2001.
- Adnyana, M.O., Sumaryanto, M. Rachmat, R. Kustiari, S.H. Susilowati, Supriyati, E. Suryani dan Soeprapto. 2000. Assessing the Rural Development Impact of the Crisis in Indonesia. Center for Agro-Socioeconomic Research, Bogor and The World Bank, Washington, D.C.
- Biro Pusat Statistik. 1995-2001. Statistik Harga Konsumen Pedesaan di Indonesia. BPS.Jakarta.
- Rachman, H.P.S., Supriyati dan Benny Rachman. 2002. Struktur dan Distribusi Pendapatan Rumahtangga Petani Lahan Sawah. Laoran Hasil Penelitian Kerjasama Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian dengan Bappenas/USAID/DAI.
- Rasahan, C.A. 1988. Perspektif Struktur Pendapatan Masyarakat Pedesaan Dalam Hubungannya Dengan Kebijakan Pembangunan Pertanian dalam Kasryno, et al (Penyunting) Prosiding Patanas : Perubahan Ekonomi Pedesaan Menuju

Struktur Ekonomi Berimbang. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Badan Litbang Pertanian.

- Syukur, M., H.P.S. Rachman dan S. Pasaribu. 1988. Pola dan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Pedesaan Jawa Barat dalam Kasryno, et al (Penyunting) Prosiding Patanas : Perubahan Ekonomi Pedesaan Menuju Struktur Ekonomi Berimbang. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Badan Litbang Pertanian.
- Susilowati, S.H., C. Saleh, A.K. Zakaria, S. Wahyuni, Supriyati, Supadi, Waluyo dan T. Nurasa. 2001. Studi Dinamika Ekonomi Pedesaan (PATANAS): Usahatani, Ketenagakerjaan, Pendapatan dan Konsumsi. Laporan Hasil Penelitian. Puslitbang Sosek Pertanian. Badan Litbang Pertanian.
- Susilowati,S.H., Supadi dan C. Saleh. 2002. Diversifikasi Sumber Pendapatan Rumahtangga di Pedesaan Jawa Barat. Jurnal agro Ekonomi 20 (1) : 85 – 109.
- Supriyati, Saptana, Sumedi dan T.B. Purwantini. 2002. Dinamika Ketenagakerjaan, Penyerapan Tenaga Kerja dan Sistem Hubungan Kerja. Laporan Hasil Penelitian Kerjasama Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian dengan Bappenas/USAID/DAI.
- Szal, R and S. Robinson. 1977. Measuring Income Inequality dalam C.R. Frank and R.C. Webb (ed). Income Distribution and Growth in Less Developed Countries, pp 491 – 533. The Brookings Institution.
- Marisa, Y. dan B. Hutabarat. 1988. Ragam Sumber Pendapatan Rumah Tangga di Pedesaan Sulawesi Selatan dalam Kasryno, et al (Penyunting) Prosiding Patanas: Perubahan Ekonomi Pedesaan Menuju Struktur Ekonomi Berimbang. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Badan Litbang Pertanian.
- Nurmanaf, A.R. 1988. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Petani Padi Sawah di Pedesaan Sumatera Barat dalam Kasryno, et al (Penyunting) Prosiding Patanas : Perubahan Ekonomi Pedesaan Menuju Struktur Ekonomi Berimbang. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Badan Litbang Pertanian.